

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi telah berlangsung sejak tahun 1998 memberi keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam sektor pendidikan. Tampak bahwa sumber-sumber belajar di luar sekolah lebih banyak mewarnai perilaku peserta didik, karena itu perilaku pendidikan perlu melakukan perubahan mendasar baik pada proses maupun *output* pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang baik, adaptif dan maupun menghasilkan *output* yang siap menghadapi tantangan internal dan eksternal globalisasi.

Menurut Mansur (Khaeruddin dkk, 2007: 3) “pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat yang bisa dilakukan sejak masih di dalam kandungan”. Tidak dapat dibayangkan misalkan tanpa pendidikan, manusia jaman sekarang tidak jauh beda dengan masyarakat jaman dahulu, bahkan mungkin akan lebih terpuruk atau lebih rendah kualitas peradabannya. Dan perlu menjadi kekhawatiran bersama bila hal senada mulai menggejala pada masyarakat kita. Abdurrahman Mas’ud (Khaeruddin dkk, 2007: 3) “sangat memilukan bahwa masyarakat Indonesia yang religious dewasa ini terpuruk dalam himpitan krisis dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan”.

Dalam mencapai tujuan pendidikan diperlukan berbagai faktor atau unsur yang mendorongnya terutama kurikulum yang diterapkannya atau dipakai. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidik demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum bukan merupakan sesuatu yang sekali jadi, namun kurikulum itu harus fleksibel dan selalu dinamis. Dengan demikian bisa membentuk kurikulum dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, karakter peserta didik, dan kebutuhan lingkungan masing-masing. Jadi perubahan kurikulum merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan menuju suatu kesempurnaan.

Perubahan kurikulum kali ini mampu mendorong terciptanya pendidikan berkualitas, yang dapat menghasilkan SDM pembangun beretos kerja tinggi. Hal ini penting, terutama dalam memasuki era globalisasi yang sarat dengan kualitas dan penuh persaingan. Oleh karena itu perubahan dan pembaharuan kurikulum harus mengikuti perkembangan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan yang akan datang serta menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang telah di paparkan oleh Muhammad Joko Susilo (2007: 4),

“Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan system pendidikan, baik melalui perangkat lunak (*software*) maupu perangkat keras (*hardware*) diantara upaya tersebut antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 dan nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.”

Bila sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat (*sentralistis*), maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut diharapkan berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Karim (Muhammad Joko Susilo, 2007: 10) berpendapat bahwa:

“Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan salah satunya adalah dengan perubahan kurikulum, sehingga mulai cawu 2 tahun ajaran 2001/2002 sudah diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan pengembangan dari kurikulum tahun 1994, dan kini dikenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang hampir sama dengan kurikulum berbasis kompetensi.”

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ditujukan, untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam mengemban identitas budaya dan bangsa. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Juga memudahkan guru dalam menyajikan pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada pilar pendidikan universal sebagaimana yang telah dicetuskan oleh UNESCO.

Bagaimanapun juga pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam ini tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Dimana standar nasional pendidikan itu sendiri terdiri atas standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dan dua dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu isi (SI) dan standar

kompetensi lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi peluang bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan kurikulum mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokrasi dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada sekolah untuk menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil (*output*) dan dampak (*outcome*), serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan terutama untuk menjamin mutu secara menyeluruh (*total quality*), dan menciptakan proses perbaikan yang berkesinambungan (*continues improvement*), karena perbaikan tidak kenal kata berhenti.

Kerja sama antara para guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini berkembang pesat. Faktor yang perlu diperhatikan dengan kesiapan dari pihak pelaksananya. Kesiapan ini sangat ditentukan

oleh para pelaku., antara lain ketulusan pemerintah pusat, aparat daerah, masyarakat dan sekolah itu sendiri.

Dengan demikian proses persiapan yang kurang, cenderung akan mendatangkan problem atau masalah yang banyak dan berat, dan tujuan yang menjadi target pencapaian tidak akan maksimal, karena disibukkan dengan berbagai problem dan kekurangan yang muncul. Sedangkan persiapan yang matang lebih cenderung akan mengurangi problem atau masalah berat sejak sedini mungkin. Sehingga sesuatu yang diharapkan akan tercapai maksimal pula.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka sekolah seharusnya memiliki komponen-komponen sekolah (kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, hubungan masyarakat dan layanan khusus). Modal yang dipunyai oleh sekolah tersebut harus dapat dikelola dengan cara baik dan terarah, sehingga akan mampu dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan harapan bagi upaya peningkatan mutu di dunia pendidikan.

Pendidikan dasar dan wajib belajar 9 tahun, merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Dalam UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari

pernyataan di atas terdapat dua sasaran pada pendidikan dasar yaitu sebagai berikut.

1. Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup di masyarakat.
2. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Dalam proses pendidikan tersebut tentunya sangat terkait erat dengan kegiatan belajar mengajar yang terjadi didalamnya. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses pembelajaran antara guru dan siswa. Pembelajaran merupakan upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa lainnya.

Sedangkan untuk mengatur standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah pemerintah mengeluarkan PP No. 41 Tahun 2007. PP tersebut berisikan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya standar sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Standar nasional pendidikan lainnya adalah standar penilaian pendidikan yang merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang tertuang dalam PP No. 20 Tahun 2007.

Pada umumnya standar proses yang dilakukan di SD belum sepenuhnya terlaksana, ini dikarenakan oleh banyaknya guru yang belum paham sepenuhnya tentang standar proses, misalkan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kebanyakan RPP yang dibuat di SD pada umumnya disusun oleh TIM, sehingga kurangnya pengembangan guru dalam proses pembelajaran resiko cenderung konvensional. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi standar proses dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn kelas tinggi yang terlaksana di SD.

B. Fokus Penelitian Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implimentasi Perencanaan
 - a. Bagaimanakah implementasi penyusunan silabus PKn sesuai dengan standar proses di SD?
 - b. Bagaimanakah implementasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn sesuai dengan standar proses di SD?
2. Implementasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - a. Bagaimana persyaratan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses di SD?
 - b. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran PKn yang terkait dengan standar proses?

- c. Bagaimana pelaksanaan penilaian mata pelajaran PKn yang dilakukan di SD?
- d. Bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan standar proses dalam mata pelajaran PKn?
- e. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan standar proses di SD pada mata pelajaran PKn?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian pada latar belakang dan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Implimentasi Perencanaan
 - a. Mengetahui implementasi penyusunan silabus PKn sesuai dengan standar proses di SD.
 - b. Mengetahui implementasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn sesuai dengan standar proses di SD?
- 2. Implementasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - a. Mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran PKn yang terkait dengan standar proses?
 - b. Mengetahui pelaksanaan penilaian mata pelajaran PKn yang dilakukan di SD?
 - c. Mengetahui upaya-upaya untuk meningkatkan standar proses dalam mata pelajaran PKn?

- d. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan standar proses di SD pada mata pelajaran PKn?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan ilmu, khususnya dalam pemahaman standar proses.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai data untuk kegiatan penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi guru
 - 1) Sebagai masukan guru untuk meningkatkan kualitas atau memperbaiki proses pembelajaran di kelas.
 - 2) Mendapat masukan tentang pelaksanaan standar proses, sehingga dapat meningkatkan pemahaman guru pada khususnya serta meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya.
 - 3) Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
 - 4) Meningkatkan kreativitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif.

b. Manfaat bagi siswa

- 1) Dengan pembelajaran yang menyenangkan, kegiatan pembelajaran akan lebih mudah dan jelas dipahami siswa.
- 2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru.
- 3) Penerapan model pembelajaran inovatif, dapat mengembangkan kreativitas, imajinasi dan rasa percaya diri bagi siswa.

c. Manfaat bagi sekolah

- 1) Sekolah menerapkan standar proses sesuai Permen Diknas No. 41 tahun 2007.
- 2) Sekolah melalui kepala sekolah perlu memotivasi guru untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan yang di atur dalam Permen Diknas No. 41 tahun 2007.
- 3) Kinerja sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dievaluasi untuk meningkatkan kualitas sekolah.
- 4) Sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar proses secara optimal.